

**STRATEGI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI KARTU MENUJU SEJAHTERA**



Skripsi

**Diajukan Kepada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial Islam**

Disusun Oleh

**Rima Fitriani
NIM. 09230009**

Dosen Pembimbing:

**Drs. H. Afif Rifai, M.S
NIP.19580807 198503 1 003**

**JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/1809/2013

Skripsi atau tugas akhir dengan judul :

**STRATEGI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MELALUI KARTU MENUJU SEJAHTERA (KMS)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rima Fitriani
Nomor Induk Mahasiswa : 09230009
Telah dimunaqosyahkan pada: Selasa, 11 Juni 2013
Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQOSYAH
Pembimbing

Drs. H. Afif Rifai, M.S

NIP. 19580807 198503 1 003

Penguji I

Suyanto, S. Sos., M.Si

NIP. 19660531 198801 1 001

Penguji II

M. Fairul Muhawir, M.Ag

NIP. 19700409 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan



Dr. H. Waryono, M.Ag

NIP. 19701010 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Fitriani

Nim : 09230009

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sejahtera” merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Yogyakarta, 28 Mei 2013

Penulis



Rima Fitriani

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Rima Fitriani

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamua 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rima Fitriani

NIM : 09230009

Judul Skripsi : Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu
Menuju Sejahtera

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Sos.I) di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2013

Pembimbing,


Drs. H. Afif Rifai, M.S
NIP.19580807 198503 1 003

MOTTO

"Janganlah terlalu membebani jiwamu dengan kesungguhan hati, hiburilah dirimu dengan hal-hal yang ringan dan lucu, sebab bila hati terus menerus dipaksa dengan memikul beban yang berat, ia akan buta"

"Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya engkau berharap"
(Q.S. Al-Insyiroh: 6,7,8)

"Hiduplah dengan suatu tujuan yang mulia karena dengan tujuan yang mulia maka kesuksesan akan kita raih"

"Meski letih dan tertatih-tatih serta terjatuh berulang kali.. aku masih bisa tersenyum...karena sebenarnya Tuhan tidak memberi sesuatu yang kita pinta, tapi Tuhan akan memberi sesuatu yang terbaik pada akhirnya"

¹ Al-Qur'an, Juz.,30, hlm. 596.

PERSEMBAHAN

*Segores tinta telah terukir
Seberkas cahaya telah terpancar
Tidak ada yang berharga
Kecuali kupersembahkan untukmu....*

*Bapakku Abdul Wakhid dan Ibukku Siti Khadijah tercinta
"Di setiap desah nafas ini, setiap langkah ini, disetiap hari yang kulalui, tak luput doa ku
panjatkan pada yang Maha Kuasa tuk senantiasa melimpahkan rahmat dan kebahagiaan di
setiap sudut kehidupan Bapak dan Ibu
Ribuan terimakasih takkan pernah cukup membalas segala doa, cinta, kasih sayang, harta
yang kalian berikan pada ananda
hingga detik ini. Ananda akan berusaha menjadi permata hati yang kalian inginkan...hanya
setiap doa yang tak lupa ananda panjatkan pada Sang Pencipta "allahummaghfirlii wa
liwalidayya warkhamhumaa kamaa rabbayaanii shoghiiraa ". Bapak dan Ibu suatu saat
ananda pasti bisa membahagiakanmu*

*Kedua Adikku, Muhammad Imdaddun Ni'ami dan Qotrun nada senyum kecil kalian menjadi
kekuatan bagiku untuk melangkah. Semoga kelak kalian menjadi orang yang berguna bagi
keluarga, agama, nusa dan bangsa*

*KH. Zaky Muhammad, Lc dan Hj. Fatma Zuhrotunnisa' STP, MP. Bapak dan Ibu yang selalu
mengajari aku arti kehidupan, memberikan fatwa, arahan dan bimbingan serta
menuangkan ilmu yang tiada tara, jasa-jasamu takakan pernah terbalaskan*

*Guruku Ainun Najib S. Th. I. yang tak pernah bosan untuk selalu memberikan pencerahan
dalam setiap langkahku, seseorang yang selalu mensupportku untuk selalu belajar,
berusaha dan berjuang untuk mewujudkan sebuah cita-cita.*

*Almamater Tercinta Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العلمين. الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله
و صحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله. اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“STRATEGI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KARTU MENUJU SEJAHTERA”** ini bisa diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap atas junjungan Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad s.a.w., yang telah menjadi utusan Allah untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan, serta rahmat bagi umat manusia di dunia ini.

Penulis menyadari bahwa dengan hadirnya skripsi ini tidak lain karena adanya bimbingan, motivasi, dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak, antara lain:

1. Bapak Dr. Waryono Abdul Ghofur, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak M. Fajrul Munawwir, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

3. Bapak Drs. H. Afif Rifa'i, M.S, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan bijaksana membimbing dan memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Bapak Suyanto, M.SI, selaku Dosen penguji terimakasih atas saran dan kritikan yang membangun semoga kelak penulis lebih teliti dan cermat dalam teknik penulisan kejenjang berikutnya. amin
5. Bapak Abdur Rozaki, M.SI, selaku dosen yang memberikan arahan kepada penulis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.
6. Bapak Asep Jahidin, M.A, Selaku penasehat akademik yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Ibu Ning Selaku bidang tata usaha terimakasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan bantuannya dalam memberikan pelayanan yang bersangkutan dengan civitas akademik.
9. Ibu Esti Setyarsi selaku seksi penanganan bantuan sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
10. Ibu Dwi Puji Lestari selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk penulis.

11. Bapak Dwi Wahyudi Hamzah, Bapak Priyo, Bapak Galih, Bapak Evan yang telah bersedia membantu untuk meemberikan data atau bahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.
12. Seluruh staff Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
13. Bulek Mus, Paman Maryono dan sepupuku Sakantu Bika Muztabah serta Simbah terimakasih untuk semuanya, curahan kasih sayang serta perhatian yang engkau berikan selama berbulan-bulan penulis jatuh sakit.
14. Simbah putri, dan (alm) simbah kakung. Terima kasih atas curahan doa yang engkau berikan.
15. Mas Nur, Mbak Yeni serta Bulek Siti, terimakasih atas dukungannya ya.
16. Pakdhe Dukuh dan Budhe Tatik serta Hana Putri Terimakasih atas doanya
17. Saudara sepupuku yang senantiasa menemani penulis saat suka-duka, Roffiatul Munawwaroh, Ahmad Rofiq, Muhammad Dimyati Rois, Ahmad Rif'an, Durrotun Nafisah. Semoga kalian semua menjadi insan yang mulia dan sukses dunia-akhirat.
18. Teman-Teman seperjuangan, anak-anak Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 09 yang selalu memberikan informasi, serta dukungan kepada penulis. Juga sahabat-sahabatku (Versia Nabella Azizi, Syafaatur Rofiah, Listyana Etikalpikawati, Mutianingsih, Rahayu Kurniasih, Siska, Andi, Rokhim dll) semoga kelak kita semua menjadi orang sukses yang berguna bagi keluarga, masyarakat.dan bangsa kita Indonesia) amien.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Landasan Teori.....	13
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Pembahasan	33

BAB II	GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA	
	A. Letak Geografis	35
	B. Visi dan Misi	35
	C. Profil Kemiskinan Kota Yogyakarta.....	51
BAB III	PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KARTU MENUJU SEJAHTERA	
	A. Pendataan Keluarga Miskin dan Pelaksanaan Program KMS ..	61
	B. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Kartu Menuju Sejahtera	75
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran.....	89
	C. Penutup.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kualifikasi Pendidikan Pegawai	50
Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Kota Yogyakarta	53
Tabel 3. Laju Pertumbuhan Penduduk	58
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta	59
Tabel 5. Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta	60
Tabel 6. Angka Putus Sekolah	78
Tabel 7. Penurunan Angka Putus Sekolah	85
Tabel 8. Perbandingan Penurunan Angka Putus Sekolah	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	40
Bagan 2. Alur Proses Pendataan Keluarga Miskin	65



ABSTRAKSI

STRATEGI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KARTU MENUJU SEJAHTERA

Sekripsi ini merupakan penelitian tentang strategi yang dilakukan oleh Dinsonakertrans Kota Yogyakarta untuk mengurangi penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial, melalui kebijakan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) sehingga akses pendidikan dapat terjangkau disemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pendataan dan penetapan keluarga miskin Kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS, serta pelaksanaan strategi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan melalui KMS.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang didukung oleh wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun analisa data yang digunakan adalah analisa data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dicanangkannya Program Kartu Menuju Sejahtera (KMS) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, program pengentasan kemiskinan dapat diatasi secara berangsur. Hal ini ditunjukkan dengan semakin berkurangnya angka putus sekolah di Kota Yogyakarta. Selain indikator berkurangnya angka putus sekolah, keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi kemiskinan juga ditunjukkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang dapat menikmati Program KMS karena persyaratan kelayakan penerima KMS semakin terus ditingkatkan, mulai dari kriteria “sangat miskin”, “miskin”, dan “hampir miskin”. Pada awalnya penerima Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui Program KMS hanya yang berstatus “sangat miskin”, kemudian ditingkatkan menjadi status “miskin”, dan kemudian ditingkatkan lagi menjadi status “hampir miskin”. Dengan peningkatan status tersebut sehingga berdampak pada semakin banyaknya penerima KMS menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengentaskan kemiskinan melalui program KMS.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,
Penanggulangan Kemiskinan, Kartu Menuju Sejahtera

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memberi penegasan dalam pembahasan skripsi agar penulis lebih terfokus dan tidak melebar serta untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami judul “*STRATEGI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI KARTU MENUJU SEJAHTERA*”, maka penulis perlu memberikan penegasan atas arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut.

Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal.¹ Sedangkan menurut Edi Suharto strategi adalah suatu usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk menjamin agar terjadi suatu perubahan-perubahan yang diusulkan dan dapat diterima oleh partisipan atau berbagai kalangan yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan.²

¹ http://carapedia.com/pengertian_definisi_strategi_info2036.html. Diunduh Tanggal 24 November 2012, Pukul 23:42

² Edi Suharto, *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, (Jakarta : Rafika Aditama, 2007), hlm. 135

Jadi yang dimaksud strategi dalam skripsi ini adalah suatu cara dimana organisasi/lembaga akan mencapai tujuannya, yang dirancang untuk menjamin agar terjadi suatu perubahan-perubahan yang dapat diterima oleh partisipan.

2. Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi. Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial tenaga kerja dan transmigrasi.³

3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan berasal dari kata pe-nan-gulang-an yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁴

Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan

³Pedoman Dinsosnakertrans, *Profil Kesejahteraan Sosial Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian*, (Yogyakarta : 2010)

⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pusaka, 2005)

kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri yang tergolong sebagai orang miskin.⁵

Jadi yang dimaksudkan dengan penanggulangan kemiskinan dalam skripsi ini adalah: upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang agar dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat.

4. Kartu Menuju Sejahtera.

KMS (Kartu Menuju Sejahtera) adalah identitas bahwa keluarga dan anggota keluarga yang tercantum di dalamnya merupakan keluarga dan penduduk miskin. Masa berlaku kartu identitas miskin selama satu tahun. Mekanisme KMS ini tidak diminta ataupun diajukan tetapi akan diberikan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai hasil pendataan serta memenuhi kriteria parameter pendataan keluarga miskin.⁶

KMS berfungsi sebagai identitas layanan bagi program jaminan pendidikan. KMS bisa digunakan untuk penyaluran keringanan jaminan pendidikan sesuai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, KMS diperuntukkan bagi keluarga miskin ber-KTP Kota Yogyakarta sesuai dengan hasil verifikasi pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta.

Dari batasan istilah tersebut diatas maka yang dimaksud dengan judul skripsi “*Strategi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju*

⁵Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm 11-12.

⁶Brosur Dinsosnakertrans, *Parameter KMS*, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (Yogyakarta : 2010)

Sejahtera” adalah Penelitian tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang mengacu kepada strategi yang dilaksanakan oleh Dinsonakertrans Kota Yogyakarta melalui kebijakan KMS yang diberikan kepada keluarga miskin, yang telah ditetapkan sebagai hasil pendataan serta memenuhi kriteria parameter keluarga miskin.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus dikembangkan. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus.

Dalam Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial (*World Summit For Sosial Development*) pada bulan Maret 1995, Dirumuskanlah definisi kemiskinan secara jelas dan gamblang beserta kriteria-kriteria yang terdapat didalamnya:

“Kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan yang berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kekurangan akses dalam pendidikan; dan layanan-layanan pokok lainnya; kondisi tidak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil”⁷

⁷United Nations (Ed): Report Of The World Summit For Sosial Development In Copenhagen, April 1995, hlm. 54. Dalam Izzedin Bakhit (et al.), *menggempur Akar-akar Kemiskinan* terj. Frederik Ruma (Jakarta:YAKOMA PGI, 2001), hlm. 4.

Sebuah hasil survei yang baru-baru ini dilakukan menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat dunia dibandingkan dengan masalah lainnya.⁸ Begitupun di Indonesia, sampai detik ini kemiskinan menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) didapati bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan bulan Maret 2012 mencapai 29, 13 juta jiwa atau 11,96%. Untuk penduduk miskin di daerah perkotaan berjumlah 10,65 juta, sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan 18,48 juta jiwa.⁹

Angka-angka diatas bukanlah angka yang sedikit, kemiskinan dan kelaparan yang diderita oleh jutaan orang di Indonesia, bahkan miliaran orang di dunia menuntut disegerakannya solusi dari masalah tersebut. Karena itu sudah semestinya penanggulangan kemiskinan menjadi kata kunci bagi semua pihak, bukan hanya di tingkat nasional tetapi ditingkat internasional.

Pada tingkat international, para pemimpin negara berkumpul pada konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium tahun 2000 yang dilaksanakan di New York. Pada konferensi tersebut mereka menetapkan upaya pengurangan separuh kemiskinan yang terjadi di Dunia sebagai tujuan pembangunan Millenium Development Goals/MDGs) yang harus dicapai pada Tahun 2015

⁸Masalah Kemiskinan Dunia Meliputi, mati kelaparan, Berbagai peperangan dan pertarungan internasional yang dilakukan oleh beberapa negara yang mengklaim menyerukan kebebasan, menjaga hak asasi manusia, persamaan wanita, dan perlindungan anak-anak, terjadinya gempa, banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi di Indonesia, dan yang terus terjadi di Bangladesh dan yang terakhir terjadi di Cina. Bertambahnya jumlah peminta-minta, dikutip dalam: <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/03/28/masalah-kemiskinan-di-dunia-dan-peran-krisis-finansial-global-dalam-memperparah-masalah/>. Diunduh pada tanggal 10 Februari 2012, Pukul 22:49.

⁹Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th.XIII, 2 Juli 2012, hlm. 1-2.

yang akan datang¹⁰. Sedangkan pada tingkat Nasional, Indonesia telah lama memberikan perhatian khusus untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Hal ini dapat di lihat dari beberapa pasal yang ada pada UUD 1945.¹¹

Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan pula karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh Bangsa Indonesia.¹²

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang Dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dinsakertrans kota yogyakarta mempunyai berbagai kebijakan untuk menangani kemiskinan agar tidak parsial tetapi holistik dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut tidak hanya dikasih ikan. Tetapi juga tidak menghilangkan kail. Tidak hanya diberi kail tetapi harus menyentuh aspek yang lebih luas. Karena, kalau tidak diberi pelatihan bagaimana cara mengail

¹⁰Ismid Hadad,"*Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Perubahan Pola Produksi Yang Ramah Lingkungan*", Disampaikan Pada Seminar Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Ke-VII Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), Departemen Kehakiman Dan HAM RI. Tanggal 14-13 Juli 2003 Dikuta Bali, hlm. 1.

¹¹ Undang-Undang Yang Menegaskan Tentang Jaminan Hak Hidup Sejahtera Bagi Warga Diantaranya Pasal 27 Ayat 2, Pasal 28 B Ayat 2, Pasal 28 C Ayat 1, Pasal 28 D Ayat 2, Pasal 28 H Ayat 1-4, Ditambah Dengan Pasal 31 Ayat 1 Tentang Hak Mendapatkan Pendidikan.

¹²Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama , 2009), hlm.131.

akan celaka. Kemudian lagi kolam pancing, termasuk sungai-sungainya. Jangan sampai sudah diberi pelatihan, diberi kailnya, kolamnya tidak diatur oleh kebijakan publik yang adil.¹³

Untuk itu dalam mengurangi Penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai banyak kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan KMS (Kartu Menuju Sejahtera). Adanya KMS disebabkan: (1) Angka putus sekolah pada tahun 2007-2008 masih 0,07%. Dan masih rendahnya peserta didik dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan yang bermutu. (2). Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu guna penuntasan belajar wajib 12 tahun. Tujuan diberikannya jaminan pendidikan daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya sehingga akses pendidikan dapat terjangkau disemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.¹⁴

Bantuan tersebut diberikan disemua jenjang sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK) baik negeri maupun swasta. Bantuan tersebut meliputi biaya operasional sekolah, investasi serta pembelian seragam dan buku.¹⁵

¹³ Edi Suhartono, “Selama Ini Kita Memberantas Orang Miskin Bukan Kemiskinannya” (Majalah Flamma, Vol. 10 April- Juni, 2006), hlm. 19

¹⁴[http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php / id / biaya - operasional - satuan - pendidikan? sobi2Task = sobi2Details&sobi2Id=58](http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/biaya-operasional-satuan-pendidikan?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=58). Di unduh pada tanggal 25 November 2012, Pukul 0:51.

¹⁵Panduan , *Petunjuk Teknis Jaminan Pendidikan Daerah*, (Yogyakarta : Dinas Pendidikan, 2010)

Kiranya patut diapresiasi tentang ide dasar yang melandasi kebijakan pemerintah yang memberikan jaminan pendidikan bermutu bagi peserta didik dari keluarga tidak beruntung secara ekonomi dengan pemberian kuota tertentu, berupa kesempatan yang sangat luas untuk mengakses pendidikan pada sekolah negeri di wilayah kota Yogyakarta. Kebijakan pemerintah tersebut menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum lemah.

Pemanfaatan KMS pada prakteknya direspon secara heterogen. Fenomena yang ada bahwa ada kuota peserta didik baru di sekolah negeri tertentu yang hampir semua dipenuhi, sebaliknya ada juga sekolah negeri yang hanya dimasuki seorang dan tiga peserta didik yang ber-KMS, terutama terjadi pada sekolah negeri yang favorit. Calon peserta didik yang ber-KMS ada yang dari keluarga KMS baik dari wilayah kota, maupun berasal dari luar wilayah kota. Mereka juga ada yang memang berasal dari keluarga ber-KMS, namun ada juga yang berasal dari keluarga mampu yang menggunakan KMS dari keluarganya yang tinggal di kota. Atas dasar itu dapat diinferensikan bahwa terjadi korelasi negatif, semakin favorit sekolahnya semakin sedikit calon peserta didik yang ber-KMS. Dengan begitu ide penggunaan KMS nampaknya belum menjadi solusi yang tepat untuk menjamin kesempatan pendidikan yang bermutu, yang sebelumnya belum pernah terpikirkan.¹⁶

Dampak positif dari kebijakan KMS secara selintas, diantaranya: memberikan pendidikan gratis wajib belajar 12 Tahun untuk warga miskin Kota Yogyakarta; adanya pemberian kesempatan belajar yang terbuka bagi

¹⁶Rochmad Wahab, “ *KMS dan Dampaknya*” dalam *Http//Www.Kms Dan Dampaknya*. Pdf. Staff site UNY. Diunduh Hari Selasa, tanggal 13 November 2012, pukul 11:27.

peserta didik yang ber-KMS untuk mengakses sekolah negeri yang favorit; adanya kesempatan yang luas bagi anak potensial untuk mengembangkan diri secara optimal; pemberian kesempatan bagi peserta didik yang mampu baik secara akademik maupun non akademik, terutama aspek ekonomik dan sebagainya.

Sebaliknya, setelah adanya kebijakan penggunaan KMS ternyata menimbulkan dampak negatif diantaranya: terjadi kesenjangan sosial bagi warga miskin dan warga yang mengaku miskin/hampir miskin untuk bisa mengakses pendidikan melalui mekanisme KMS, terlebih jika mempunyai anak peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan swasta dan SMA/SMA/SLB/MA dan SMK; karena biaya pendidikan mahal, terjadinya manipulasi informasi tentang perpindahan penduduk dari luar Kota Yogyakarta; terjadinya permasalahan pendataan KMS.¹⁷

Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pendataan dan penentuan keluarga miskin dalam penerimaan KMS secara obyektif guna mengurangi atau mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul, serta strategi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan dan terberdayakannya penyandang masalah kemiskinan.

¹⁷<http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/biaya-operasional-satuan-pendidikan?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=58>. Di unduh pada tanggal 25 November 2012, Pukul 0:59.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS?
2. Bagaimana Strategi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sehat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendataan keluarga miskin kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS.
2. Untuk mengetahui Strategi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan melalui kartu menuju sejahtera.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari berbagai segi, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis : Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan informasi ilmiah tentang penanggulangan kemiskinan pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan umumnya kepada semua pembaca.
2. Secara Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan DINSOSNAKERTRANS Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan. Dan juga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pemerhati program penanggulangan kemiskinan, lembaga sosial baik LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) maupun Pemerintah, untuk

dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan merumuskan program penanggulangan kemiskinan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, penulis berusaha melakukan kajian terhadap beberapa pustaka ataupun karya yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini. Buku-buku dan karya ilmiah yang sebelumnya pernah ditulis dan ditelusuri sebagai bahan perbandingan maupun rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini, yakni:

Pertama, Karya Yusuf Qardhawi yang berjudul *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*. Dalam kitabnya tersebut beliau memaparkan secara panjang lebar mengenai kemiskinan dan upaya pengentasannya menurut pandangan islam.¹⁸ pada karyanya tersebut, Yusuf Qardhawi tidak menyentuh pada permasalahan kemiskinan melalui jalur kultural dan kesadaran masyarakat untuk bekerja dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

Kedua, tulisan Wiwid Sri Lestari, dengan judul “ *Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama)*”. Penelitian yang telah dilakukan Wiwid Sri Lestari, mengedepankan pembahasan pada strategi Dinas Sosial Provinsi DIY dalam melakukan strategi pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama di Desa Gadingsari Sanden Bantul, dalam

¹⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Konsep Islam dalam Pengentasan Kemiskinan* terj. Umar Fanany, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1996).

skripsi ini dikemukakan bahwa Dinas Sosial Provinsi DIY menggunakan strategi pemberdayaan dengan pendekatan tradisional dan pendekatan transformatif. Dalam pendekatan tradisional, ciri yang menonjol dari aspek perencanaan yakni pemerintah. Sedangkan dalam pendekatan transformatif, ciri yang menonjol dari aspek pelaksanaan dan dampak yakni proses berlangsungnya kegiatan usaha bersama dengan cara pendampingan, dengan tujuan tidak hanya mengembangkan pertumbuhan ekonomi namun pertumbuhan sosial juga dikembangkan.¹⁹

Ketiga, tulisan Wardlatul Asyriyah, dengan judul “ *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Didesa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah* “. penelitian ini membahas tentang strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui usaha tambak, dengan adanya tambak diharapkan ekonomi masyarakat akan meningkat dan kebutuhan sehari-hari masyarakat akan terpenuhi.²⁰

Keempat: tulisan Rochmad Wahab (Rektor UNY) yang berjudul “*KMS dan Dampaknya*”. Tulisan ini lebih menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif kebijakan KMS bagi peningkatan mutu pendidikan.²¹ Perbedaan tulisan-tulisan tersebut dengan skripsi yang penulis

¹⁹ Wiwid Sri Lestari, “ *Peran Dinas Sosial Provinsi DIY dalam pengentasan kemiskinan strategi pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama)*”, Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga)

²⁰ Wardatul Asriyah, “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Didesa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah* “, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga 2008).

²¹ Rochmad Wahab, “ *KMS dan Dampaknya*”, Opini, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2008).

teliti, bahwasannya penulis lebih menjelaskan proses pendataan sampai proses penerimaan KMS bagi warga miskin Kota Yogyakarta. Dan upaya penanggulangan kemiskinan yang mengacu kepada strategi yang dilakukan oleh Dinsoakertrans Kota Yogyakarta pada sebuah kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi Penyandang masalah kemiskinan serta meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah kebijakan KMS (Kartu Menuju Sejahtera) sehingga akses pendidikan dapat terjangkau disemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

G. Landasan Teori

1. Tinjauan tentang kemiskinan

Menurut jenisnya kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, kemiskinan relatif yaitu: kemiskinan yang dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibanding dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Kedua, Kemiskinan absolut yaitu: suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti: sandang, papan, pangan dan pendidikan.²²

Sedangkan menurut akar penyebab yang melatarbelakanginya, kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua kategori. Pertama,

²² Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan: Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa* (Yogyakarta : Aditiya Medika, 1996), hlm. 1-2.

kemiskinan alamiah yaitu: kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka dan atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah.

Kedua, kemiskinan buatan yaitu kemiskinan yang terjadi karena struktur sosial yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata.

Kemiskinan struktural, biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat dimana terdapat perbedaan yang tajam antara mereka yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Mereka itu, walaupun merupakan mayoritas terbesar dari masyarakat, dalam realita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk mampu memperbaiki nasib hidupnya. Sedangkan minoritas kecil masyarakat yang kaya raya biasanya berhasil memonopoli dan mengontrol berbagai kehidupan, terutama dari segi ekonomi dan politik. Selama golongan kecil yang kaya raya itu masih menguasai berbagai kehidupan masyarakat, selama itu pula diperkirakan struktur sosial yang berlaku akan bertahan. Akibatnya terjadilah apa yang disebut kemiskinan struktural.²³

2. Masalah kemiskinan di perkotaan

Menurut Parsudi Suparlan akar dari timbulnya masalah kemiskinan di perkotaan adalah: Karena kedudukan Kota-kota dalam masyarakat Negara tersusun dalam jaringan yang bertingkat-tingkat dan merupakan pusat-pusat penguasaan bagi pengaturan kesejahteraan, kehidupan warga

²³*Ibid*, hlm. 3-4.

masyarakat negara. Sedangkan bagian terbawah dalam sistem penguasaan adalah pedesaan. Karena itulah manusia cenderung berorientasi ke Kota; atau dengan kata lain, orang Desalah yang berorientasi ke Kota dan bukan orang Kota yang berorientasi ke Desa.

Karena adanya kecenderungan orientas pada Kota, Kota akan cenderung tumbuh terus menerus dan menjadi semakin kompleks karena kota mempunyai potensi atau kemampuan untuk menampung pendatang-pendatang baru dari pedesaan dan Kota-kota lainnya atau tempat-tempat lainnya. Kemampuan atau potensi Kota adalah karena corak sistem ekonomi lebih menekankan pada pekerjaan-pekerjaan dalam bidang industri dan produksi barang jadi atau setengah jadi. Pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut dapat menampung pekerjaan kemampuan keahlian dalam teknologi tinggi, maupun pekerjaan yang hanya mengandalkan pada ketrampilan dan kekuatan tenaga kasar tubuhnya.

Dengan demikian, di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan, lebih banyak terdapat alternatif-alternatif untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian; dari yang paling halus sampai dengan yang paling kasar, dari yang paling bersih sampai dengan yang paling kotor dan dari yang bermoral sampai dengan yang tidak bermoral. Sedangkan didaerah pedesaan, sistem ekonominya lebih menekankan pada penghasilan bahan-bahan mentah dan bahan-bahan makanan. Maka

alternatif-alternatif yang tersedia atau yang ada dalam sistem ekonomi tersebut lebih terbatas daripada yang terdapat diperkotaan.²⁴

3. Ukuran-ukuran kemiskinan

Kemiskinan memang merupakan persoalan multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam bentuk angka-angka. Dengan kata lain, tidak mudah untuk menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari batas garis kemiskinan.

Menurut kriteria Biro Pusat Statistik (BPS) dalam penanggulangan kemiskinan absolut yaitu dengan menghitung pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi berdasarkan data survei Sosial-Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditetapkan batas garis kemiskinan absolut adalah setara dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 2.100 kalori per orang plus beberapa kebutuhan non-makanan lain, seperti, sandang, papan, jasa dan lain-lain.²⁵ diluar metode yang dikembangkan BPS, di Indonesia batasan lain tentang kemiskinan absolut dikembangkan oleh Sajogyo dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Mengusulkan cara mengukur kemiskinan dengan kemiskinan absolut. Cara yang dikembangkan adalah memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Ada tiga golongan orang

²⁴ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan : Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)

²⁵ Mas'oed Mochtar, *Politik, Birokrasi, Dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994). hlm. 137.

miskin, yaitu golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali yang mempunyai pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240 hingga 360 kg, dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras per tahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg. Meskipun upaya yang dilakukan Sajogya pada akhirnya menimbulkan perdebatan, namun dia telah berjasa dalam meletakkan standar obyektif pengukuran garis kemiskinan.²⁶

Oleh karena ukuran-ukuran obyektif kemiskinan sangat bervariasi, maka perlu berhati-hati dalam penggunaan alat ukur tersebut.

4. Dimensi-dimensi kemiskinan

Dimensi-dimensi yang terkait dalam gejala kemiskinan. Pertama, kemiskinan berdimensi ekonomi atau material, yaitu, papan, pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dengan rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana untuk

²⁶ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan, Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996)

terlibat dalam proses politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah.

Dimensi-dimensi kemiskinan pada hakikatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, sejalan dengan pembangunan nasional, bahwa yang dikejar tidak semata-mata pertumbuhan ekonomi melainkan juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya dan politik).²⁷

5. Pendataan Keluarga

Pendataan keluarga Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) adalah kegiatan pengumpulan data-data primer tentang demografi, keluarga berencana, dan tahapan keluarga sejahtera serta data individu anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah. Tujuan pendataan keluarga adalah untuk memperoleh data base keluarga dan individu.²⁸

²⁷Heru Nugroho, *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*, (Aditya Media : Yogyakarta, 1995). Hlm. 26-31.

²⁸Siti Internawati, *Studi Pelaksanaan Pendataan Keluarga Miskin Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan*, (eJournal Ilmu Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013), hlm, 312

Mekanisme pendataan keluarga menurut Badan Pusat Statistik, pendataan keluarga meliputi:

1. Langkah pertama: proses penjarangan rumah tangga miskin
 - a. Petugas pendata, yang merupakan tenaga mitra kerja lapangan BPS, Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT), untuk mengkaji dan mencatat rumahtangga yang dianggap miskin dalam RT tersebut.
 - b. Pengkajian oleh petugas pendata bersama Ketua RT berpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh BPS yaitu menanyakan ke Ketua RT tentang siapa warga dilingkungan RT tersebut yang sering mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan dan non pangan). Pengkajian dimulai dengan rumahtangga yang dianggap paling miskin dilingkungan tersebut (*descending order*).
 - c. Petugas juga melengkapi data rumahtangga miskin dari Ketua RT dengan informasi keluarga miskin dari hasil pendataan BKKBN yang datanya tersedia ditingkat RT sepanjang belum disebutkan oleh ketua RT. Data ini pun diperkaya lagi dengan data dari sumber pendataan lain seperti hasil sensus kemiskinan BPS Provinsi/BPS Kabupaten/Kota, bagi daerah yang melaksanakan kegiatan tersebut.

2. Langkah kedua : Melakukan Verifikasi Lapangan dan Penyerapan aspirasi masyarakat.

- a. Setelah melakukan penjarangan rumah tangga miskin pada langkah pertama, selanjutnya petugas melakukan verifikasi dilapangan atas kebenaran informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang disebutkan diatas. Dilakukan dengan mendekati kondisi mereka dengan kriteria umum kemiskinan (probing)
- b. Jika suatu rumahtangga yang semula dinyatakan miskin ternyata setelah diamati oleh petugas, tidak miskin maka rumahtangga yang telah dicatat dalam formulir akan dianulir.
- c. Petugas juga mencatat keluarga/ rumahtangga miskin yang ditemukan dilapangan, tetapi belum tercakup dalam daftar tersebut diatas. Proses ini dilakukan dengan cara penelusuran informasi dari tetangga ke tetangga, tokoh masyarakat dan dari pengamatan petugas sendiri.
- d. Proses tersebut dikenal sebagai proses penilaian kemiskinan oleh masyarakat itu sendiri yang disebut sebagai pendekatan emic (suatu proses justifikasi terhadap sesuatu oleh masyarakat itu sendiri dengan tolak ukur nilai-nilai yang berkembang dalam entitas mereka).

Proses tahap pertama dan kedua ini telah menggabungkan 3 (tiga) sudut pandang dalam menilai miskin tidaknya suatu rumahtangga yaitu tokoh formal masyarakat (yang diwakili oleh keta

RT), petugas BPS, dan masyarakat itu sendiri (perspektif *emic*). Kegiatan pada tahapan-tahapan dimaksud diharapkan mampu menjaring secara objektif sasaran pendataan yaitu rumahtangga miskin.

3. Langkah Ketiga: Melakukan Pencacahan dari Rumah ke Rumah
 - a. Rumahtangga yang sudah terjaring dan dinyatakan layak miskin, selanjutnya didata dengan cara melakukan wawancara langsung dari rumah ke rumah dengan daftar pertanyaan yang memuat 20 pertanyaan dengan 14 variabel diantaranya sebagai variabel-variabel kemiskinan, 4 variabel sebagai variabel program intervensi.²⁹
 - b. Tahapan proses (penjarangan dan pendataan dari rumah ke rumah) dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Tim Taskforce BPS yang dibentuk ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan BPS pusat.
4. Mendata rumahtangga miskin diluar wilayah administratif pemerintahan: Gubuk-gubuk liar dan sejenisnya. Selain mendata rumahtangga miskin sebagaimana mekanisme yang telah disebutkan, rumahtangga miskin yang berada diluar wilayah RT/RW atau yang dikenal sebagai pemukiman liar seperti gubuk liar disepanjang pinggir rel kereta api, dibantaran sungai, dibawah jembatan, dilokasi tempat pembuangan sampah, dan sejenisnya juga di data secara khusus oleh

²⁹ Ibid., Hlm, 313

petugas *taskforce* kecamatan dan atau oleh petugas *taskforce* BPS Kabupaten/Kota. Dengan demikian seluruh rumahtangga miskin baik yang bertempat tinggal di dalam ataupun diluar struktur wilayah administratif resmi diharapkan tercakup dalam pendataan Rumahtangga miskin/sensus kemiskinan ini.³⁰

6. Strategi penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

³⁰ Ibid., Hlm, 314

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) merumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Strategi 1: Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Disamping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk

tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Strategi 2: Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Strategi 3: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang

tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proposional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Strategi 4: Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan

bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.³¹

Sedangkan upaya penanggulangan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijakan pemberdayaan masyarakat adalah kebijakan yang memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak untuk menekan dan mendesak mereka ke pinggir atau ke posisi ketergantungan. Yang diperlukan bukan Cuma paket “ nasi bungkus” bantuan ekonomi atau yang sifatnya hanya karitas saja.³²

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, agar tidak menyimpang dari prosedur dan tata cara ilmiah sehingga hasil penelitian mempunyai bobot ilmiah yang tinggi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif menurut Taylor yang dikutip oleh Lexsi J.

³¹Team Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, <http://tnp2k.go.id/mengenai-tnp2k/tentang-tnp2k/>, Diunduh Pada Hari Jumat Tanggal 24 Mei 2013, Pukul 13:00.

³²Suyanto Bagong, *Perangkap Kemiskinan, Problem Dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1996)

Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis ataupun lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.³³ Dengan demikian penulis berupaya menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

1. Teknik Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, dalam memilih informan ini dipilih secara sengaja, setelah membuat ciri dari informan yang dibutuhkan, yang penting disini bukan jumlah informan kasusnya, melainkan tergantung pada jenis informasi yang hendak dikumpulkan. Cara termudah mendapatkan informan adalah dengan teknik “bola salju”. Dalam teknik ini peneliti harus mengenal beberapa informan kunci dan meminta memperkenalkannya kepada informan lain.³⁴ Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, maka penulis memilih informasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial: Ibu Dra. Esti Setyarsi
- b. Seksi Bantuan Sosial: Bapak Yoseph
- c. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM : Ibu Dwi Puji Lestari, Ibu Endang Pamulasih.
- d. Ketua RT: Bapak Waluyo.

³³Lexsi.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001) Cet .Ke-15 hlm.3

³⁴MT. Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*, (Bogor : Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, 1998, hlm. 50

- e. Warga yang ber-KMS : Bapak Sumardi, dan Gustiawan
- f. Warga yang tidak mendapatkan KMS : Bapak Yuli Wahono

Adapun obyek penelitiannya adalah proses pendataan keluarga miskin kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS dan Strategi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kartu Menuju Sehat.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Interview disini merupakan teknik atau pengumpulan data-data dengan jalan tanya jawab langsung yang terdiri dari dua orang yang berhadap-hadapan, tetapi dalam kedudukan yang berbeda-beda yaitu antara penulis dengan subyek penelitian yang telah ditentukan.

Adapun jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitu penulis memberikan kebebasan terhadap informan untuk berbicara dan memberikan keterangan yang diperlukan penulis melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

b. *Observasi*

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki³⁵. Adapun observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non- partisipan, yaitu

³⁵*Ibid.*, hal 136.

penelitian bukan merupakan bagian dari anggota yang ditelitinya. Dalam hal ini penulis mengamati dan mencatat beberapa hal yang berhubungan dengan strategi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan serta proses pendataan dan penentuan keluarga miskin.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penyelidikan ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber-sumber dokumen³⁶. Metode ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip penelitian. Adapun data yang digali dari dokumen tersebut adalah data-data tentang gambaran umum Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang-Bidang Dinsosnakertrans, Struktur Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Dinsosnakertrans dan lain-lain.

3. Teknik Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut, teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber lainnya. Hal itu dapat di capai dengan jalan:

³⁶Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 123.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, misalnya untuk mengetahui bagaimana proses pendataan keluarga miskin kota yogyakarta yang akan mendapatkan kartu menuju sejahtera.
- b. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti membandingkan jawaban yang di berikan oleh narasumber (seksi pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial) dengan jawaban dari para peserta program kartu menuju sejahtera.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif kualitatif*. Keseluruhan data yang terkumpul akan diidentifikasi dan diklasifikasikan sedemikian rupa sesuai dengan kategori masing-masing, kemudian diadakan penganalisaan data secara terperinci.

Untuk lebih jelasnya analisa data pada penelitian *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:³⁷

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain-lain
- b. Pemilihan data dan informasi dalam satuan-satuan data dan informasi

³⁷ Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 1999)

- c. Kategoris data, baik menurut jenis, sifat maupun keterkaitan antara data satu dengan data yang lain
- d. Penafsiran data, dilakukan dalam kerangka analisis data dan informasi, mencari sebab akibat, membuat argumentasi, membuat deskripsi dan lain-lain.
- e. Penarikan kesimpulan

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi data-data secara sistematis keseluruhan, dan disusun berdasarkan per bab dan kemudian akan dibagi lagi dalam sub-sub bab antara lain:

Bab I. Yaitu pendahuluan: bab ini berisi tentang penegasan judul yang mana digunakan sebagai penegasan pengertian supaya tidak terjadi salah faham dalam pemaknaannya. Latar belakang masalah yang berisi tentang alasan-alasan mengapa memilih judul tersebut. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tentang permasalahan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Merupakan uraian tentang profil kemiskinan Kota Yogyakarta. Gambaran umum Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang meliputi, visi misi, tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tujuan dan sasaran, kedudukan, dan struktur organisasi.

Bab III. Data dan analisis data yang mencakup pembahasan tentang strategi penanggulangan kemiskinan Dinsosnakertrans yang meliputi, rencana strategis dan bagaimana proses pendataan keluarga miskin Kota Yogyakarta

Bab IV. Merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran yang diharapkan bisa membawa manfaat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal sebagai kesimpulan dan sekaligus jawaban dari pokok permasalahan pada penelitian ini. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pendataan keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS yaitu dengan menginventaris hasil konfirmasi data dari RT/RW/Kelurahan/Kecamatan atau pekerja sosial masyarakat (PSM), kemudian melakukan konfirmasi data secara tatap muka kepada ketua RT selanjutnya menindak lanjuti dengan melakukan verifikasi (kunjungan rumah) atas data hasil konfirmasi setelah itu hasil pendataan diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai penentuan tahap akhir warga penerima KMS.
2. Strategi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial Kota Yogyakarta melalui kebijakan KMS yaitu: memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu guna penuntasan belajar wajib 12 Tahun. Tujuan diberikannya jaminan pendidikan daerah adalah agar tidak ada anak usia putus sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah

karena alasan biaya sehingga akses pendidikan dapat terjangkau disemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan analisis serta kesimpulan yang didapat dalam penelitian, ditemukan beberapa hal yang menjadi saran sebagai rekomendasi dari penelitian ini. Beberapa hal yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. parameter pendataan terlalu rendah untuk itu diharapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi meningkatkan parameter penentuan keluarga miskin Kota Yogyakarta.
2. Dalam penentuan keluarga miskin yang akan mendapatkan KMS diharapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat memberikan jaminan KMS tersebut kepada semua warga yang telah tercatat dan juga terdata secara keseluruhan sebagai keluarga miskin.
3. Hendaknya anggaran biaya pendidikan di naikkan supaya dapat meng-cover semua kebutuhan siswa sekolah
4. Hendaknya Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta lebih teliti lagi dalam verifikasi data, sehingga tidak ditemukan lagi data ganda

C. Penutup

Syukur alhamduillah atas Rahmat yang diberikan Allah SWT.

Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat sadar di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki, *izā tamma al-amr badā al-naqṣ* (jika suatu perkara sudah selesai, maka akan terlihat kekurangannya). Karena itu, kritik dan saran konstruktif demi sempurnya skripsi ini sangat penulis harapkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, dan semoga Allah meridho'i dan menerima segala amal yang kita perbuat

DAFTAR PUSTAKA

- Anton H. Bakker. *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Bagong Suyanto. *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditiya Medika, 1996.
- Bakhit, Izzedin[et al.]. *Menggempur Akar-akar Kemiskinan*. Terj. Frederik Ruma. Jakarta: YAKOMA PGI, 2001.
- Bambang Sudibyo. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya: Media, 1995
- Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.
- Brosur Dinsosnakertrans, *Parameter KMS*, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Yogyakarta, 2010.
- Djamaluddin Ancok. *Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Edi Suharto. *Pekerja Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Jakarta : Rafika Aditama, 2007.
- Edi Suhartono. *Selama Ini Kita Memberantas Orang Miskin Bukan Kemiskinannya*. Majalah Flamma Institut For Reseach and Empowerment (IRE). Yogyakarta: Vol. 10 April- Juni, 2006.
- Heru Nugroho. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- <http://www.KMS> dan dampaknya.. Diunduh hari selasa, tanggal 13 November 2012, pukul 11:27.
- http://carapedia.com/pengertian_definisi_strategi_info2036.html. Diunduh Pada Tanggal 24 November 2012, Pukul 23:42.
- <http://igi.fisipol.ugm.ac.id/index.php/id/biaya-operasional-satuan-pendidikan?sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=58>. Di unduh pada tanggal 25 November 2012, Pukul 0:59.

<http://ngada.org/bn101-2012.htm>., Diunduh Pada Tanggal 19 Desember 2012, Pukul 10:44.

<http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Depsos&op=program>, Di Unduh pada Tanggal 09 Februari 2013, Pukul 20:32.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Yogyakarta: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2012.

Laporan Akhir Inventarisasi Data Statistik, Yogyakarta: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2012.

Lexsi. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.

Lexsi.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung; PT. Remaja Rosda Karya 2001

Mochtar, Mas'oed. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Moeljarto Tjokrowinoto “ Strategi Alternatif Pengentasan Kemiskinan”. Makalah untuk Seminar Bulanan P3PK UGM, 1993.

MT. Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*,Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, 1998

Panduan, *petunjuk teknis jaminan pendidikan daerah*, Dinas Pendidikan, Yogyakarta: 2010

Parsudi Suparlan. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media,1995.

Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

.Wardatul Asriyah, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Tambak Didesa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN.

Winarno Surahmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982

Wiwid Sri Lestari, *Peran Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui KUBE*. Yogyakarta: Perpustakaan UIN.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rima Fitriani
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 10 April 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : Riema.millaty@yahoo.com
No. Telp/HP : +6285226227906
Alamat Rumah : Bantrung, Batealit, Jepara
Alamat Tinggal : Ponpes Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta

ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Wakhid
Nama Ibu : Siti Khadijah
Pekerjaan : Guru

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Raudlotul Athfal 1994-1997
2. SDN 04 Bantrung, Tahun 1997-2003
3. MTS Amal Muslimin Bantrung, tahun 2003-2006
4. MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, tahun 2006-2009
5. Masuk Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta T. A. 2009/201

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Osis MTS Amal Muslimin periode 2004-2005
2. Bendahara gerakan pramuka Mts Amal Muslimin periode 2005-2006
3. Peserta lomba putri kecantikan sekarisidenan Pati Tahun 2001

INTERVIEW GUIDE

A. Pertanyaan untuk seksi strategi penanganan sosial yang menangani KMS(Ibu Esti Setiarsi)

1. Apa itu KMS?
2. Bagaimana sejarah munculnya kebijakan KMS?
3. Apa tujuan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui KMS?
4. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam terlaksanakannya kebijakan Penanggulangan kemiskinan melalui KMS?
5. Apa kelemahan dan apa keunggulan dari kebijakan KMS?
6. Apakah ada faktor penghambat dari kebijakan KMS, kalo ada apa faktor tersebut?
7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui KMS?

B. Pertanyaan Untuk Pekerja Sosial Masyarakat (Ibu Dwi Puji Lestari)

1. Apakah anda melakukan verifikasi pendataan warga miskin kota Yogyakarta yang akan mendapatkan KMS?
2. Apakah anda mengalami kendala dalam melakukan proses pendataan?
3. Kalo ada suatu kendala, Apakah kendala tersebut?
4. Bagaimana cara anda dalam melakukan Verifikasi pendataan warga miskin Kota Yogyakarta?
5. Seperti apakah keadaan warga yang terdata mendapatkan KMS?

6. Bagaimana pendekatan yang anda lakukan dalam proses pendataan warga miskin Kota Yogyakarta?
7. Adakah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pendataan warga miskin kota yogyakarta?
8. Seperti apa hasil yang dicapai setelah melakukan proses pendataan keluarga miskin kota yogyakarta?

C. Pertanyaan untuk warga ber-KMS (Bapak Sumardi).

1. Apakah bapak Sumardi mendapatkan KMS?
2. Sebagai orang yang mendapatkan KMS, bagaimana respon anda tentang adanya KMS?
3. Apa manfaat KMS yang bapak peroleh?
4. Apakah jaminan KMS sudah dapat mengcover semua kebutuhan sekolah?

D. Pertanyaan Untuk Gunawan

1. Apakah program KMS sudah dapat mengcover seluruh kebutuhan sekolah?
2. Sebagai siswa yang mendapatkan KMS, bagaimana respon saudara tentang adanya KMS?
3. Apa manfaat jaminan program KMS yang anda Peroleh?

FORM VERIFIKASI PENDAPATAN KELUARGA MISKIN TAHUN 2012

KOTA YOGYAKARTA

A. IDENTIFIKASI

SUMBER DATA : 1 BARU 2 LAMA
KECAMATAN :

RW

Mempunyai KMS Kategori :
KELURAHAN :

RT

ALAMAT :
Nomor Handphone yang bias dihubungi :

(nama pemegang handphone)

NO	NAMA ANGGOTA	Hubungan Keluarga	Mutasi	NIK	Jenis Kelamin	Tgl / Bln / Thn Lahir	Status Perkawinan	Kartu Keluarga	Pekerjaan	Pendapatan	Tingkat Pendidikan	Kelas	Keterangan Sekolah		Ketrampilan	Bantuan yang diterima						Kesehatan / ibu Hamil	Program KB
													Nama Sekolah	N / S		Raskin	KUBE	USEP KM / USEP BUKS	PEW	P2WKSS	UP2K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

B. KONDISI KEMISKINAN

25 Pendapatan rata-rata per anggota keluarga per bulan : 1. ≤ Rp. 300.000 2. Rp. 300.001-Rp. 400.000 >Rp. 400.000
Jumlah total pendapatan : Jumlah seluruh anggota klg = Rp.

26 Rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan
Makan (beli beras, sayur, lauk pauk, gula, teh, kopi, minyak goreng)
a. Rp. 225.000 – Rp. 375.000 b. > Rp. 375.000
Pendidikan (bayar uang sekolah / SPP, uang saku, buku-buku, uang kegiatan, Transport ke sekolah)
a. Rp. 225.000 – Rp. 375.000 b. > Rp. 375.000
Fasilitas Rumah (beli bensin, gas/minyak tanah untuk masak, rokok, pulsa, sabun, sampo, pasta gigi dll)
a. Rp. 225.000 – Rp. 375.000 b. > Rp. 375.000

Jumlah total rata-rata pengeluaran per bulan 1. Rp. 375.000 – Rp. 675.000 2. > Rp. 675.000

KODE

B. KONDISI KEMISKINAN

				KODE
27.	Luas lantai rumah/bangunan tempat tinggal	:	Keseluruhan rumah Luas rasio per ruang	<input type="text"/>
28.	Status kepemilikan tempat tinggal	:	1. Lainnya bukan milik sendiri, bayar 2. Lainnya bukan milik sendiri, tidak bayar 3. Milik sendiri	<input type="text"/>
29.	Jenis bahan dinding terluas dari tempat tinggal	:	1. Bambu/Kayu/Kotangan/Tembok Plesteran Kualitas rendah/ bahan lain berkualitas rendah 2. Tembok / bahan lain berkualitas tinggi	<input type="text"/>
30.	Kebiasaan buang air besar	:	1. Tidak di MCK 2. Di MCK	<input type="text"/>
31.	Sumber air minum	:	1. Air hujan/Sungai/ lainnya 2. Sumur/PAM/Ledeng/Pompa/Galon (air mineral)	<input type="text"/>
32.	Sumber penerangan	:	1. Bukan Listrik (Stop) 2. Listrik (PLN/Non PLN (Lanjut ke 32a & 32b)	
	Tagihan listrik per bulan	:	1. < Rp. 50.000 2. > Rp. 50.000	<input type="text"/>
33.	Kemampuan member makan anggota keluarga 3x sehari	:	1. Tidak mampu a. Sarapan 2. Mampu b. Makan Siang c. Makan Malam	<input type="text"/>
	Rata-rata makan perhari dalam 1 minggu terakhir	:		<input type="text"/>
34.	a. Kemampuan membeli lauk pauk	:	a. Tahu/tempe	
	b. Kemampuan menyajikan telur/daging/ayam susu 2x dalam seminggu	:	1. Tidak mampu 2. Mampu	<input type="text"/>
	c. Rata-rata pengeluaran membeli lauk pauk sehari	:	Rp.	
35.	Apakah ada anggota keluarga yang merokok	:	1. Tidak ada (stop) 2. Ada (lanjut ke 35a, 35b, 35c, & 35d)	<input type="text"/>
	a. Jumlah anggota keluarga yang merokok	:	Orang	
	b. Jumlah total rata-rata batang rokok yang dihisap dalam sehari	:		
	c. Merk rokok yang sering dihisap	:		
	d. Rata-rata pengeluaran untuk membeli pulsa dalam seminggu	:	Rp.	
36.	Apakah ada anggota keluarga yang menggunakan Handphone / ponsel	:	1. Tidak ada (stop) 2. Ada (lanjut ke 36a & 36b)	<input type="text"/>
	a. Jumlah anggota keluarga yang menggunakan Handphone / Ponsel	:	Orang	
	b. Rata-rata pengeluaran untuk membeli pulsa dalam 1 minggu	:	Rp.	
37.	Kemampuan membeli pakaian baru 1 stel bagi anggota keluarga dalam 1 tahun	:	1. Tidak mampu 2. Mampu	<input type="text"/>
38.	Kemampuan mengobati anggota keluarga yang sakit ke puskesmas atau poliklinik	:	1. Tidak mampu 2. Mampu	<input type="text"/>
39.	Kepemilikan barang / tabungan selain rumah dan tanah bernilai lebih dari Rp. 1.800.000,-	:	1. Tidak mampu 2. Mampu	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> TV / Radio Rp.		<input type="checkbox"/> Komputer/Laptop Rp.	
	<input type="checkbox"/> Kulkas Rp.		<input type="checkbox"/> Perhiasan/Tabungan Rp.	
	<input type="checkbox"/> Handphone Rp.		<input type="checkbox"/> Pompa Air Rp.	
	Jumlah			
	Sepeda motor yang dimiliki keluaran tahun		Merk Rp. Pemanfaatan	
40.	Aset Tanah	:	1. Tidak memiliki 2. Memiliki M ²	<input type="text"/>
41.	Apakah keluarga mempunyai kewajiban untuk membayar utang/ kredit	:	1. Tidak ada (stop) 2. Ada (lanjut ke 41a & 41b)	<input type="text"/>
	a. Jumlah anggota keluarga yang menggunakan Handphone / Ponsel	:		
	b. Rata-rata pengeluaran untuk membeli pulsa dalam 1 minggu	:	Rp. Jumlah keseluruhan utang Rp.	
42.	Apakah terdapat anak usia sekolah yang DO/tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan sampai dengan SMA / SMK	:	1. Tidak ada (stop) 2. Ada (lanjut ke 42a)	<input type="text"/>
	a. Jumlah anggota keluarga yang menggunakan Handphone / Ponsel	:		
43.	Apakah keluarga ikut dalam aktifitas kegiatan sosial dilingkungannya	:	1. Tidak ada 2. Ikut 1 kegiatan atau lebih	<input type="text"/>

Tanggal Verifikasi / /
Tanda tangan Petugas

Tanda tangan Responden

(.....)

(.....)